



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21693 Faksimal (0756) / Fax. (0756) 21693

Laman : <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : satpolpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR : 900/04/Kpts/Pol.PP & PK/ 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA NON ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Pengamanan kelancaran Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Penegakan Ketertiban serta ketentraman umum dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, perlu ditunjuk Tenaga Non ASN untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
- b. bahwa untuk penunjukan Tenaga Non ASN seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /29/ Kpts/ BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/ 01/ Kpts/Polpp&PK/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Tindaklanjut dari Diktum KESATU, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Penempatan dan tugas masing-masing Tenaga Non ASN pada bidang Sekretariat, bidang Pemadam Kebakaran, bidang Penegak Peraturan Daerah dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- KETIGA** : Pegawai Tenaga Non ASN wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan menandatangani Perjanjian Kerja, dan dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah pimpinan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ZULKIFLI. S.Sos

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196902181993031003

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 900/ 04/Satpol.PP& Damkar/PS/2025

TANGGAL : 03 Januari 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON ASN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN.**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	RINOL RIASMI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
2.	RHEF MARDIO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
3.	NASDI EFENDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
4.	SOFIAN TANJUNG	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
5.	ZETRIAL. AM	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
6.	RESKI Hidayatullah	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
7.	ROKI GUSLIANTO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
8.	JEAN GUSWANDI SARDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
9.	ARWEN	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
10.	NURMANSYAH	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
11.	RORI OVINALDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
12.	RUDI HARTONO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
13.	TRI ANDIKA PURBA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
14.	RIKO RAHMAYANTO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
15.	ANDREA WILLIAM	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar

16.	OKTA DELVI YANDRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
17.	DEZO RIZKI DWI PUTRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
18.	ANDRIANTO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
19.	RISKI ZAH PUTRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
20.	JOKO SETIAWAN	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
21.	JONI MASRIANDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
22.	YAUMUL KHAIR. YP	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
23.	RAHMAD HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
24.	DEDENG RAMADANA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
25.	OTRA DARLIUS CANDRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
26.	EDIDA PUTRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
27.	TESPINORIKA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
28.	SEVI ANDRO MARTA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
29.	AGUNG YULIADI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
30.	RIKI MASER	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
31.	ENDRA HADI SUSANTO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
32.	DENI PUTRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
33.	SYAPRIDAL	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
34.	RUSLIDION	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
35.	ANTONI A. YAKUB	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar

36.	RIO FERDALINO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
37.	BRAMANSYAH	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
38.	YUKI SERGIO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
39.	MUHARAM SARIHI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
40.	BUSTAGEMA IRVANDI AKIBAR	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
41.	ADI SUHENDRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
42.	DONI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
43.	ANGGIA PUTRA FERNANDO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
44.	RIDO ARDO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
45.	ROMI HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
46.	EGI NOFRI HOSNI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
47.	RIKI CHANDRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
48.	ENGGAR ALI SANDRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
49.	RIZFAN FATLI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
50.	BAYU EFENDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
51.	ADI RUSMAN	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
52.	JUMAIDI ERIZAL	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
53.	ROOBY ONSAM JANUAR	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
54.	ANGGA PRATAMA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
55.	HENGKI FIRMANSYAH	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar

56.	JUNAIDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
57.	RENDI NOFRIWANDI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
58.	BAMBANG ANEKA PUTRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
59.	ALBER KUSUMA HANGGI	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
60.	KHAIRUL RAHMAN	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
61.	ALI MARDISON	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
62.	RONI WIJAKSONO	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
63.	BONY PEBRIAL NUR	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
64.	REDOI ESSA PUTRA	Tenaga Non ASN	Bidang Damkar
65.	DIAN ADILLA PUTRA	Tenaga Non ASN	Sekretariat
66.	GUSMALIZA	Tenaga Non ASN	Sekretariat
67.	AYU WULANDARI	Tenaga Non ASN	Sekretariat
68.	REDO FEBBRI	Tenaga Non ASN	Sekretariat
69.	LUCSY PARAMIDA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
70.	PUTRI PURNAMA SARI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
71.	DENSI SUSNI IRAWATI	Tenaga Non ASN	Penegakan Peraturan Daerah
72.	INDRA BUDIMAN	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
73.	DETRI NALDO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
74.	EFRI SANDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
75.	FERA ANDESKA CANDRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas

76.	WIRA ATMAJA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
77.	EKA SATRIA BAKTI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
78.	DONI SYAHPUTRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
79.	ADEK SATRIA PUTRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
80.	DARWISMEN	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
81.	REFI ADE ALATAS	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
82.	ZULHENDRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
83.	KHAIRUL ZAMAN	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
84.	ZENO HANDHYKO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
85.	EKI RORIANDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
86.	IZMIL HAMDA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
87.	BOBBY ANIZAL	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
88.	FAKHRIZAL FAUZI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
89.	DIKA MENDRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
90.	MUSWERI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
91.	FEBY KRISTIAN	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
92.	DONAL MAHYUDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
93.	ARDI SUSANTO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
94.	EFFAN DWI PUTRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
95.	MUKHRIDAL	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas

96.	ANZI NOVI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
97.	ILHAM SYAHRIAL	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
98.	NODI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
99.	AFIT DEFRI ASRO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
100.	SEFRINALDO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
101.	VALDIO GERRY MILANDO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
102.	RIKO YULIAN TANJUNG	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
103.	AGUNG SATRIA PRATAMA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
104.	ROZI FITRIADI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
105.	JUL IFANDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
106.	YUAFRIDAL	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
107.	FAUZAN AZIM	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
108.	YOGI PUTRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
109.	YOGI HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
110.	EFRI GUSRIANTO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
111.	DAFID KURNIAWAN	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
112.	WANDI JULMA INDRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
113.	FEBRIANTO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
114.	VORDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
115.	WINDI RAMADHANTO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
116.	ISMANIA RAHAYU PUTRI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas

117.	AYU INDRA SARI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
118.	RIRI YUBERKO ARLIN	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
119.	IRFAN YUSRIANTO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
120.	ANGGA PUTRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
121.	DAFIDSON	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
122.	MIKEL	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
123.	VENDO ERIATAMA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
124.	RAMADANI A.P	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
125.	NOFRIANDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
126.	PRIMADONI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
127.	HAFIZUL ILMA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
128.	FEBRI FANDRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
129.	JEFRI NURDIANTO	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
130.	AFNI OLINA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
131.	ANDIKA JAYA PUTRA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
132.	RANDIKA DWIPA	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
133.	MUTIARA DINDA KARSYAH	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas
134.	JUPRI MANALDI	Tenaga Non ASN	Trantibbum dan Linmas

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tk I IV/h
NIP. 196902181993031003